



Tahap Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Objek Wisata

Iskandar¹, Taufiqurokhman²

^{1, 2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

¹iskandar.23010800015@student.umj.ac.id

²taufiqurokhman@umj.ac.id

Abstrak

Kebijakan pemerintah pusat dan fenomena wisatawan perkotaan mengunjungi daerah wisata pedesaan belum sepenuhnya diimbangi dengan optimalisasi pengelolaan objek wisata di tingkat desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana inisiatif pemerintah desa dalam memanfaatkan objek wisata potensial yang ada, khususnya dalam pengelolaan Curug Dadali sebagai objek wisata di Desa Wargaasih, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan field research, serta menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif dengan jenis partisipasi pasif. Tahap penelitian dimulai dengan identifikasi keberadaan objek wisata alam potensial yang berada di wilayah desa tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Desa Wargaasih dalam pengelolaan objek wisata, khususnya Curug Dadali, sudah ada dan mengarah pada pemanfaatan objek wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat. Namun, keterbatasan wawasan tentang kepariwisataan pengurus dan masyarakat sekitar, serta sosialisasi, menjadi hambatan dalam perkembangan pengelolaan. Sebagai rekomendasi, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengelola, pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, serta kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar pengelolaan objek wisata dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan, Objek wisata, Pemerintah Desa.

Abstract

The policy of central government and local tourists visit village tourism area not yet fully balanced with tourist attraction management optimally in the village areas. This research is done to find out how initiative government in the village in utilizing existing potential object on that area, especially in managing Curug Dadali as tourist attraction in Wargaasih village, Kadupandak subdistrict, Cianjur District, Province of West Java. The methods used are descriptive qualitative research with approach field research, also apply the technique of data collection through participative observation with kind of passive participative. The stage of observation starts with identification of existence the object of potential nature tourism on that area. This result of research show that the policy of government Wargaasih village in managing tourist attraction, especially Curug Dadali, already exist and is

leading to utilization the tourist attraction to increase Pendapatan Asli Desa (PADes), also public welfare. But, limitations about tourism and local public, also socialization become an obstacle in management. As recommendation, overcome these limitations, can be done through update management capacity, utilization maximum local potential, cooperation between village government, public and other related parties for management tourist attraction can run more effectively and provide benefits for a long time.

Keywords: Policy, Tourist attraction, Village government.

1. Pendahuluan

Curug Dadali, yang merupakan objek wisata yang terletak di wilayah Desa Wargaasih, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Merupakan salahsatu objek wisata yang dikelola dengan sistem kebijakan pemerintah desa. Pengelolaan objek wisata di pedesaan diperlukan dengan pendekatan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal dan memperkenalkan keindahan alam. Menurut Natori (2001:6), keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di suatu objek sangat bergantung pada terciptanya hubungan yang harmonis dan terintegrasi antara wisatawan, masyarakat lokal, dan sumber daya yang ada di daerah tersebut (Sabam Syahputra Manurung, 2022).

Dalam hal kebijakan dan fenomena wisatawan perkotaan mengunjungi daerah wisata pedesaan, belum sepenuhnya diimbangi dengan optimalisasi pengelolaan objek wisata di tingkat desa. Optimalisasi pengelolaan objek wisata di desa membutuhkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal dan potensi wilayah. Menurut Garrod (2003), kepemimpinan yang kompeten, pemberdayaan masyarakat lokal, menghubungkan keuntungan ekonomi dengan inisiatif konservasi, serta melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan adalah komponen penting dalam perencanaan pariwisata partisipatif yang sukses (Lao et al., 2024). Dengan perencanaan tata kelola yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dengan memperhatikan eksploitasi berlebih dan mendorong praktik wisata ramah lingkungan, dapat mengoptimalkan manfaat pariwisata dan menjaga kelestarian alam desa.

Relevansi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mamonto et al., 2021) dengan judul *Kebijakan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*, hasil kebijakan pengembangan desa wisata yang baik bukan terletak pada tahapan agenda hingga evaluasinya, tetapi pada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, melalui analisis kebijakan, dilakukan penilaian terhadap kebijakan yang ada terkait kemampuannya dalam menjawab kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Wiranto et al., 2024) yang berjudul *Pengelolaan Objek Wisata Pantai Bontolan di Desa Bone Baru, Banggai Laut, Sulawesi Tengah*, dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan objek wisata Pantai Bontolan di Desa Bone Baru, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut.

Fenomena pengunjung dari kota bepergian ke tempat wisata pedesaan dengan berbagai tujuan. Banyak orang datang untuk menikmati suasana tenang, seperti agrowisata, ekowisata, wisata petualangan, dan wisata etnik hanyalah beberapa dari beragam bentuk wisata pedesaan. Bentuk-bentuk pariwisata di pedesaan dapat berkembang dengan cepat di masa depan (Rara Sugiarti, Istijabatul Aliyah, 2010). Kekhasan budaya Indonesia, sumber daya alam, dan ikatan

interpersonal menjadi daya tarik utama industri pariwisata tanah air. Pertumbuhan industri pariwisata diharapkan dapat melestarikan lingkungan dan memperkuat jati diri bangsa. Meski demikian, pembangunan pariwisata di Indonesia tetap mengedepankan keberagaman sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suprpta, Putu Agustana, 2024).

Menurut Suyitno (2001), dalam bahasa Inggris, istilah "wisata" disebut "tour," yang secara etimologi berasal dari kata "torah" dalam bahasa Ibrani yang berarti belajar, "tornus" dalam bahasa Latin yang berarti membuat perjalanan, dan "tour" dalam bahasa Perancis yang berarti membuat orang tertawa. Secara umum, orang cenderung menggunakan kata "wisata" dengan rekreasi. Wisata adalah sebuah perjalanan, namun tidak semua perjalanan dapat dikatakan wisata. Wisata alam menurut Anonimous (1982) dalam Saragih (1993) Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun hasil budidaya, pariwisata adalah suatu jenis kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memungkinkan pengunjungnya merasakan dan mempelajari hal-hal baru, mendapatkan inspirasi, dan mengembangkan kecintaan terhadap alam (Tangian & Kumaat, 2020).

Kartasmita (1997:142) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan upaya untuk memahami dan menafsirkan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) pemerintah sehubungan dengan suatu permasalahan, (2) apa yang menyebabkan atau mempengaruhinya, dan (3) apa saja pengaruh dan dampak kebijakan publik tersebut. Anderson dalam Islamy (1994: 19) mengartikan kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam rangka mengatasi permasalahan tertentu. Friedrich dalam Wahab (1991:13) mengartikan Kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan oleh individu, organisasi, atau pemerintah dalam situasi tertentu sehubungan dengan hambatan tertentu sambil mencari kemungkinan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan atau mencapai tujuan (Muhammad, 2017).

Dalam perspektif kebijakan, peran pemerintah desa sangat penting dalam mengambil keputusan terkait pariwisata di tingkat desa. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membuka kesempatan bagi berkembangnya otonomi desa. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan dan kemandirian desa, pemerintah desa berhak menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah secara mandiri. Desa mempunyai tanggung jawab dan hak untuk mengelola dan mengembangkan potensinya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam rangka pembangunan dan kemandirian desa (Purna Aji Galih Pangestu & Farid Ma'ruf 2016). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana inisiatif pemerintah desa dalam memanfaatkan objek wisata potensial yang ada, khususnya dalam pengelolaan Curug Dadali sebagai objek wisata di Desa Wargaasih.

2. Metodologi

Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan field research, serta menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif jenis partisipasi pasif. Dalam pendekatan partisipasi pasif, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian tanpa turut serta dalam aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut (Sugiyono, 2018). Untuk memperoleh data empiris yang objektif, karena keterlibatan minimal peneliti membantu menjaga naturalitas dinamika situasi yang diamati.

Tahap penelitian dimulai dengan identifikasi keberadaan objek wisata alam potensial yang ada, dalam analisis data dengan pendekatan induktif umum. Berdasarkan identifikasi sementara, di Desa Wargaasih terdapat beberapa objek wisata yang ada. Namun, objek wisata yang memiliki tingkat potensi untuk menarik wisatawan umum adalah Curug Dadali, sementara objek wisata lain merupakan situs petilasan Rd. Mangkunagara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahap kebijakan dalam pengelolaan objek wisata potensial di Desa Wargaasih. Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa, bagian Perencanaan Desa, dan tokoh masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Objek wisata alam adalah aset berharga yang memiliki nilai tinggi, terutama karena tidak semua wilayah memiliki keunggulan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata. Desa Wargaasih di Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, merupakan salah satu wilayah dengan potensi wisata alam yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal. Dengan keberadaan wisata di desa ini meliputi keindahan alam yang unik dan memiliki daya tarik tersendiri, menawarkan kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk mengelola potensi wisata ini, sehingga tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.

Sungai Cibala yang merupakan anak sungai Cibuni yang mempunyai debit air yang cukup besar dan konsisten meskipun pada musim kemarau merupakan sumber aliran Curug Dadali. Meski ketinggian air menurun sepanjang musim kemarau, Curug Dadali tetap menjadi air terjun permanen yang tidak terkena dampak kekeringan karena Sungai Cibala sendiri merupakan salah satu anak Sungai Cibuni yang bermuara ke laut Selatan. Curug Dadali mendapat manfaat dari kondisi ekologi dan pariwisata karena daya tariknya sebagai tujuan wisata sepanjang tahun tetap terjaga, sehingga membuka peluang bagi pertumbuhan wisata alam yang stabil dan tidak bergantung pada musim tertentu.



Gambar 1 : Curug Dadali
Sumber: Web DPMPTSP Cianjur

Menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Cianjur memberikan informasinya. Dengan koordinat -7.186489, 107.004450, Air Terjun Dadali

terletak di antara Desa Wargaasih di Kecamatan Kadupandak dan Desa Waringinsari di Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini strategis secara geografis karena berada di perbatasan administratif yang dapat diakses oleh masyarakat dari dua desa tersebut, sekaligus memperkuat posisi Curug Dadali sebagai objek wisata yang potensial di kawasan Cianjur. Sebagai bagian dari aset alam yang dimiliki oleh Kabupaten Cianjur. Curug Dadali menunjukkan potensi untuk dikembangkan dalam pariwisata berkelanjutan yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui diversifikasi sektor ekonomi lokal.

Tahap kebijakan pengelolaan objek wisata dilakukan oleh pemerintah Desa Wargaasih, dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes). Dalam aspek pemberdayaan, hal ini memperhatikan keterlibatan komunitas secara aktif. Pemerintah Desa Wargaasih menempatkan masyarakat lokal sebagai pengelola utama, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan objek wisata memberi peluang bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan ekonomi, baik melalui pendapatan dari jasa wisata maupun peningkatan usaha lokal.

Curug Dadali juga menghadirkan potensi wisata yang berdampingan dengan fungsinya sebagai sumber air bagi kebutuhan masyarakat lokal. Keberlanjutan debit air dari Sungai Cibala yang menopang Curug Dadali memungkinkan kawasan ini menjadi sumber irigasi sekaligus destinasi wisata. Pendekatan pengelolaan yang menjaga keseimbangan antara pemanfaatan air untuk pertanian dan pengembangan wisata akan meningkatkan nilai Curug Dadali sebagai sumber daya lokal yang multifungsi dan kebermanfaatannya. Selain sebagai objek wisata, Curug Dadali juga memiliki fungsi penting dalam hal pengairan dan irigasi, terutama bagi pertanian di sekitarnya. Aliran air dari curug ini digunakan untuk menyuplai kebutuhan irigasi bagi lahan pertanian yang ada di sekitar area tersebut. Dengan adanya curug ini, para petani dapat mengandalkan sumber air yang cukup untuk mendukung keberlanjutan pertanian mereka, terutama di musim kemarau. Fungsi pengairan ini turut membantu meningkatkan hasil pertanian yang ada di sekitar kawasan Curug Dadali.

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari keberadaan Curug Dadali adalah peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta ekonomi lokal. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung, warga desa dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan usaha-usaha kecil, seperti warung makan, penginapan, dan oleh-oleh khas daerah. Hal ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, pendapatan dari sektor pariwisata dapat memperkuat PADes yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan fasilitas umum lainnya.

Saat ini, teknis pengelolaan objek wisata Curug Dadali telah dikelola oleh masyarakat dengan dibentuk tim kepengurusan pengelola berdasarkan hasil Musrebangdes di Desa Wargaasih. Dari sisi kebijakan pemerintah desa, pengelolaan objek wisata ini sudah tepat, karena melibatkan masyarakat. Namun, keterbatasan wawasan tentang kepariwisataan oleh pengurus dan masyarakat sekitar, serta sosialisasi yang masih minim, menjadi suatu hambatan dalam perkembangan pengelolaan objek wisata tersebut.

3.2 Pembahasan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang status dan jenis desa, perencanaan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban

desa dan masyarakat, keuangan dan aset desa, pembangunan desa, dan pembangunan kawasan pedesaan (Wijayati, 2018). Sementara dalam kepariwisataan pada objek wisata di wilayah Desa Wargaasih, hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Cianjur Nomor 102 Tahun 2022 tentang Desa Wisata, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata. Hal ini dapat menjadi semangat untuk meningkatkan pengelolaan objek wisata, dan menciptakan objek wisata yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, desa memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya. Melalui pengelolaan potensi desa, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan usaha mikro, desa dapat menjadi sumber pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa harus mempunyai tujuan tertentu; Artinya tidak bisa dilakukan sembarangan atau hanya karena kebetulan saja. Kebijakan harus dikaitkan dengan kebijakan lain di masyarakat; mereka tidak bisa ada dalam ruang hampa. Implementasi, interpretasi, dan peningkatan pendapatan masyarakat harus menjadi tujuan utama program (Haryono, 2018).

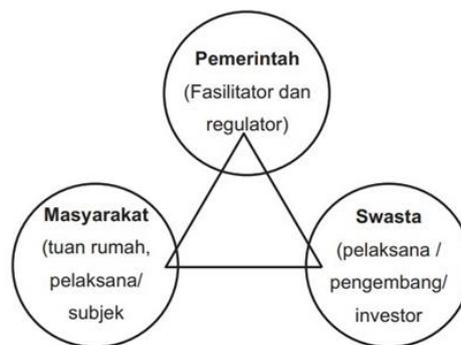
Pengembangan kawasan wisata Curug Dadali membutuhkan peran serta berbagai stakeholder, dan memaksimalkan fungsi manajemen. Menurut Stoner yang dikutip Wijayanti (2008:1), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kerja anggota organisasi serta pemanfaatan sumber daya manusia organisasi lainnya guna mencapai tujuan organisasi tertentu (Tangian & Kumaat, 2020). Langkah praktis, yang relevan untuk mengatasi hambatan pengelolaan kepariwisataan di Desa Wargaasih adalah dengan bekerjasama dengan investor untuk memberikan dukungan modal. Dalam memaksimalkan promosi dan meningkatkan daya tarik wisatawan, peran pemuda yang ada dapat dimaksimalkan untuk aktif mempromosikan melalui media sosial, serta melakukan sosialisasi tentang kepariwisataan kepada masyarakat. Prinsip-prinsip pembangunan pariwisata nasional yang berlandaskan pada ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebagai landasan kehidupan, dapat terus dikedepankan guna mencapai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa serta antara manusia dengan alam, termasuk alam. sumber daya dan elemen geografis. itu selaras dengan budaya Indonesia (Suprpta, Putu Agustana, 2024).

Potensi Curug Dadali dengan keberlanjutan debit air dari Sungai Cibala yang menopang Curug Dadali menjadikan kawasan ini sebagai sumber irigasi sekaligus objek wisata. Pendekatan pengelolaan yang menjaga keseimbangan antara pemanfaatan air untuk pertanian dan pengembangan wisata akan meningkatkan nilai Curug Dadali sebagai sumber daya lokal yang multifungsi dan bermanfaat. Karena keberadaan pariwisata juga memiliki efek positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Peluang bagi sektor pendukung dapat dilihat dari meningkatnya pariwisata domestik dan internasional akan mendukung usaha seperti kuliner, kerajinan tangan, dan penginapan tumbuh secara signifikan. Namun, perlu diperhatikan bahwa agar pariwisata dapat berfungsi optimal, diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti fasilitas publik, akses transportasi, dan promosi wisata yang baik (Wiranto et al., 2024).

Jika dimaknai Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Kepariwisata mengandung substansi yang menguraikan tentang syarat-syarat untuk mengembangkan usaha pariwisata, antara lain mengembangkan usaha pariwisata, mengidentifikasi kawasan-kawasan strategis, dan mengelola pariwisata sesuai dengan hak, kewajiban, dan larangan setiap orang. dan peraturan-peraturan ini, yang dapat digunakan sebagai panduan bagi pertumbuhan pariwisata, mengatur lebih banyak hal. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah yang mempunyai kesempatan untuk melaksanakan peraturan kepariwisataan harus mendukung pengembangan kepariwisataan di

daerahnya masing-masing agar tercapai pembangunan kepariwisataan yang baik, khususnya bagi desa-desa yang mempunyai potensi pariwisata di seluruh Indonesia. Apabila potensi pariwisata dikembangkan, maka dapat meningkatkan perekonomian daerah dengan menciptakan peluang usaha, pendapatan, dan prospek kerja, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan (Pricilia, 2024).

Timothy (1999) dalam (Dewi, 2013) menegaskan bahwa ada dua cara untuk menguji keterlibatan masyarakat dalam pariwisata. Kedua sudut pandang tersebut adalah (1) tentang keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan (2) tentang manfaat yang diperoleh masyarakat dari pertumbuhan pariwisata. Timothy menggarisbawahi perlunya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan aspirasi dan tujuan pembangunan serta kapasitas mereka untuk mendapatkan manfaat dari pariwisata. Se jauh mana penduduk lokal menerima dan mendukung pengembangan desa wisata menentukan keberhasilannya (Wearing, 2001). Mulai dari tahap perencanaan, pemantauan, dan pelaksanaan, masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan berperan penting dalam pertumbuhan desa wisata. Sebagai pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata, komunitas lokal sama pentingnya dengan sektor publik dan dunia usaha, seperti yang ditunjukkan oleh contoh yang disajikan oleh Wearing.



Gambar 2 : Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Pariwisata

Sumber: diadaptasi dari Wearing 2001 (Dewi, 2013)

Dengan kebijakan yang ada, pengelolaan Curug Dadali dapat menghasilkan berbagai manfaat bagi berbagai unsur terkait. Bagi pemerintah desa, hal ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), yang pada gilirannya mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Pengelolaan yang efektif akan membantu masyarakat dalam jangka panjang, tidak hanya sebagai penyedia air untuk irigasi pertanian tetapi juga sebagai tujuan wisata yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, perluasan objek wisata ini berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan peluang kerja, serta meningkatkan keberhasilan sosial dan ekonomi. Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian desa secara keseluruhan, pengelola yang berasal dari masyarakat akan mendapat tambahan yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Desa Wargaasih dalam pengelolaan objek wisata, khususnya Curug Dadali, sudah ada

dan mengarah pada pemanfaatan objek wisata yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun sudah ada kebijakan yang mendukung, teknis pengelolaan objek wisata tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman tentang kepariwisataan di kalangan pengelola dan masyarakat, serta kurangnya dukungan dalam hal promosi dan sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui peningkatan kapasitas pengelola, pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, serta kerjasama yang lebih baik antara pemdes, stakeholder serta masyarakat, agar pengelolaan objek wisata bisa berjalan efektif dan bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Haryono, H. (2018). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mempersiapkan Produk Unggulan Wilayah Pedesaan Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Rumah. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 6(1), 35–43. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i1.1905>
- Lao, H., Kabu, E., & Nazarudin, H. (2024). Peran Masyarakat Lokal Dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Desa Fatumnasi, Timor Tengah Selatan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 1967–1976. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3925>
- Mamonto, S. S., Sampe, S., & ... (2021). Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Pengelolaan Sumberdaya ...*, 1(2), 6–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/psp/article/view/40611>
- Muhammad, N. dan. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik* (Issue April).
- Pricilia, J. (2024). *Analisis peraturan undang undang kepariwisataan republik indonesia*. 7, 14173–14179.
- Purna Aji Galih Pangestu, R., & Farid Ma'ruf, M. (2016). Upaya Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul). *Publika*, 4(10), 1–10. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/17684/16084>
- Rara Sugiarti, Istijabatul Aliyah, G. Y. (2010). *Pengembangan Potensi Desa Wisata Di Kabupaten Ngawi*.
- Sabam Syahputra Manurung, A. R. (2022). *Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism)*. 1(3), 141–147. <https://doi.org/10.55123/toba.v1i3.845>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo, S.Pd (ed.); Edisi Ke 2). ALFABETA.
- Suprpta, Putu Agustana, I. N. (2024). *Locus Majalah Ilmiah FIA_Unipas Vol 16 No. 1 – Februari 2024* / 89. 16(1), 89–102.
- Tangian, D., & Kumaat, H. M. . (2020). Buku Ajar Pengantar Pariwisata. *Buku Program Studi DIII Perhotelan Politeknik Negeri Manado*, 43–43. https://repository.polimdo.ac.id/2848/1/Buku_Ajar_Pengantar_Pariwisata.pdf
- Wijayati, H. (2018). *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Center for Security and Welfare Studies UNAIR. <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa-herlin-wijayati/>

Wiranto, M., Rachman, E., & Antu, Y. (2024). *Pengelolaan Objek Wisata Pantai Bontolan Di Desa Bone Baru Banggai Laut Sulawesi Tengah*. 11(2), 535–540.